KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I KANTOR WILAYAH PAPUA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum			
	NOMOR SOP	:	W30.0T.02.02-043
	TGL PEMBUATAN	:	08 MEI 2024
	TGL REVISI	:	
	TGL EFEKTIF	:	10 MEI 2024
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA KANTOR WILAYAH ANTHONIUS M AYORBABA, SH., M.Si NIP. 19710515 199610 1 001
	NAMA SOP	:	CERAMAH PENYULUHAN HUKUM

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1.Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. 2.Peraturaran Menteri Hukum Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum 3.Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 4.Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI 5.Surat Edaran Ka-BPHN Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH)	1.Memiliki kemampuan data 2.Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi 3.Mengetahui mekanisme pembuatan laporan
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1.TSH 2.simulasi 3.Mobil Penyuling 4.Pembentukan /Pembinaan Desa/Kelurahan 5.Peresmian Desa/Kel Sadar Hukum 6.Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi	1. Peraturan Kepala BPHN Nomor PHN.HN.03.05-73 tentang pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa/kelurahan sadar hukum, Peraturan perundang-undangan, nilai atau norma yang hidup dan berkembang di masyarakat sebagai bahan materi penyuluhan 2.Program Kerja 3.TOR 4.Komputer/Printer/Scanner 5.Jaringan Internet
PERINGATAN :	**PENCATATAN/PERLENGKAPAN :**
Jika tidak dilaksanakan sosialisasi melalui ceramah penyuluhan hukum, informasi hukum maupun nilai atau norma yang berkembang di masyarakat kurang tersebar untuk diketahui	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		KADIV YANKUM	KABID YANKUM	KASUBID PENYLHN HKM	FUNGSIONAL UMUM	Inst/LSM/Ormas/sekolah/univ/masy	Perlengkapan	Waktu	Out Put	
1	Surat permohonan ceramah masuk dari instansi/LSM/Ormas/sekolah/univ/masy							2 hari kerja	Surat Permohonan penyuluhan hkm Inst/LSM/ormas/sekolah/univ/masy	
2	Hasil pengamatan Divisi Yankum tentang diperlukannya penyuluhan hukum diwilayah / tempat tertentu							5 hari kerja	Rekomendasi Atasan	
		Y	T							
3	Surat Penolakan Permohonan Ceramah setelah mendapat disposisi dari Kadiv Yankum							2 hari kerja	Surat Penolakan permohonan	
4	Persetujuan permohonan ceramah setelah mendapat disposisi dari Kadiv Yankum							2 hari kerja	Disposisi Kadiv yankum untuk ditindaklanjuti	
5	Pembahasan untuk persetujuan pelaksanaan Ceramah PH dan melakukan persiapan anggaran , tempat, materi, narasumber dan moderator						Anggaran, tempat, materi, narasumber, moderator, ATK	10 hari kerja	Acc kadiv yankum	
6	Memberikan surat tugas penetapan personil							2 hari	Surat Tugas	
7	Pelaksanaan Kegiatan							1 hari	Tersosialisasikan peraturan UU ke masyarakat	
8	Membuat Laporan Kegiatan							5 hari	Laporan Akhir Kegiatan	
9	Selesai									